



**PENETAPAN**

**Nomor 422/Pdt.P/2021/PA Sgm.**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANA N YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**#namapemohon**, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 09 Januari 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kota Makassar. selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**#namapemohon**, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 25 Juli 1997, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Agama Islam, beralamat di Jalan Tidung 10 No. 151, RT 003, RW 009, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Fajrinuddin, S.H. Advokat yang berkantor di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara permohonan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA Sgm. tanggal 27 Desember 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA Sgm.



1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 Pemohon I dan Pemohon II Telah Melangsungkan pernikahan di Jl. Ina Saudari No.1C Sesuai dengan Surat Keterangan Sudah Nikah No.Reg 108/SKSN/IMAM/Pis-Sel/VII/2020.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II Menikah berdasarkan hukum Islam, dimana Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Wali Hakim yang bernama Muhammad Syarif, dengan mahar berupa Sebentuk cincin emas dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Herzon dan Abd. Zulkarnain. Namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Attarauf Bilal Khadafi, lahir di Makassar tanggal 07 Januari 2021.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan dapat tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA Sgm.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (#namapemohon) dengan Pemohon II (#namapemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2020 di Jl. Ina Saudari no. 1C, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider:** Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Isbat Nikah tersebut berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena para Pemohon dinikahkan oleh imam yang tidak berwenang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya dikarenakan para Pemohon dinikahkan oleh imam yang tidak berwenang, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1)

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Sgm dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ridwan, S.H., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA Sgm.



PANITERA PENGGANTI,

Ridwan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0
4. PNBP Surat Panggilan	:	Rp	0
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA Sgm.